

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

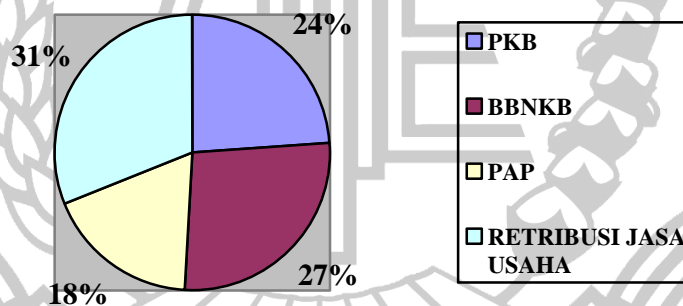
Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia memberikan wewenang kepada Pemerintah Provinsi untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah tertuang pada Undang-Undang Perpajakan. Besarnya pajak terutang tersebut nantinya akan dipungut kepada Wajib Pajak melalui badan yang terbentuk dalam administrasi perpajakan pada tingkat pertama yaitu provinsi dan tingkat kedua yaitu daerah baik kota atau kabupaten yang terbentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah (UPT PPD BAPENDA) kota atau kabupaten yang berada dibawah naungan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) provinsi. UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan merupakan salah satu unit pelaksana yang bertugas untuk melakukan pemungutan terhadap potensi pajak daerah yang ada di sekitar Kabupaten Magetan salah satunya adalah PKB. PKB tersebut akan diperoleh dari setiap kepemilikan kendaraan yang sudah menjadi obyek pajak, berdasarkan data pada bulan Januari sampai dengan April 2019 tercatat ada sejumlah 73.486 kendaraan bermotor yang sudah terdaftar menjadi obyek pajak di Kabupaten Magetan. Objek pajak juga semakin meningkat dikarenakan terdapat 4.939 kendaraan baru yang menjadi obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan April 2019.

Data tersebut akan memberikan kesimpulan bahwa jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Magetan selalu bertambah setiap bulannya. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut akan mempengaruhi setiap pendapatan yang diperoleh sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Tabel 1. 1
Data Target Realisasi PAD 2019

	Jenis Pungutan	Target (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)	%
1.	PKB	83.470.000.000	29.487.084.300	35,33
2.	BBNKB	35.990.000.000	14.164.500.000	39,36
3.	PAP	205.000.000	54.901.750	26,78
4.	RETRIBUSI JASA USAHA	36.000.000	16.482.400	45,78

Sumber: Data Dinamis UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan



Sumber: Data Dinamis UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan

Gambar 1. 1
Realisasi PAD sampai bulan April 2019

Berdasarkan tabel 1.1 data dinamis yang ada pada tahun 2019, PKB memiliki peran sebagai penyumbang paling besar dibandingkan dengan jenis pungutan pajak pada sektor lainnya, tetapi pada gambar 1.1 PKB sendiri realisasinya sampai dengan bulan April 2019 tidak sebesar pajak yang lain seperti realisasi pada Pajak

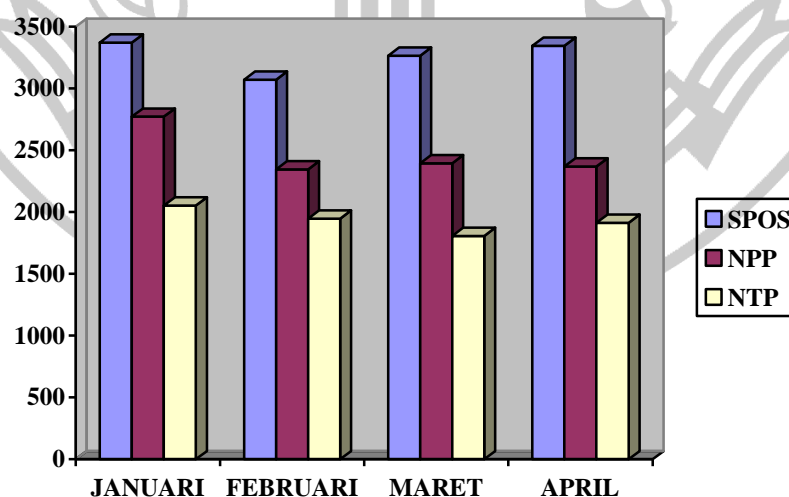
Daerah BBNKB dan Retribusi Jasa Usaha. Oleh karena itu, UPT. PPD BAPENDA Provinsi Jawa Timur Magetan melakukan berbagai kegiatan serta program yang bertujuan untuk mengupayakan masyarakat tertib, tepat dan patuh dalam pembayaran PKB.

Dalam pembayaran PKB, UPT.PPD BAPENDA Provinsi Jawa Timur Magetan bekerjasama dengan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang diartikan sebagai suatu sistem administrasi dimana kegiatannya dilakukan pada satu tempat yang ditujukan guna memperlancar serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 1. 2
Jumlah Cetak SPOS, NPP, NTP

Periode	Jumlah Cetak SPOS	Jumlah Cetak NPP	Jumlah Cetak NTP	Jumlah Surat Tercetak
Januari	3.371	2.772	2.052	8.195
Februari	3.072	2.346	1.946	7.364
Maret	3.265	2.396	1.807	7.462
April	3.345	2.370	1.912	7.627

Sumber: Data Arsip UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan



Sumber: Data Arsip UPT.PPD BAPENDA Kabupaten Magetan

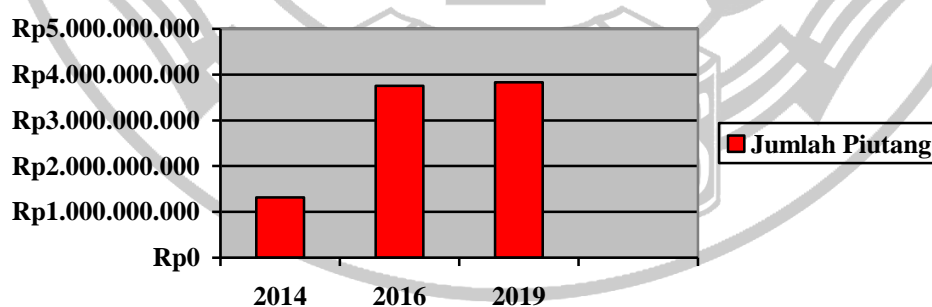
Gambar 1. 2
Diagram Jumlah Cetak Surat Ketetapan

Ada beberapa hambatan yang terjadi pada UPT. PPD BAPENDA Provinsi Jawa Timur Magetan. Seperti yang terlihat di tabel berikut merupakan data yang berisikan jumlah pencetakan pada Surat Pendataan Obyek dan Subyek (SPOS), Nota Perhitungan Pajak (NPP) dan Nota Tagihan Pajak (NTP) pada bulan Januari - April. Wajib pajak sering terlambat melakukan pembayaran pajak sehingga sampai pada penerbitan NTP sehingga seperti yang dilihat pada Tabel 1.2 kita bisa menyimpulkan bahwa surat terus terbit, disini kita dapat menyimpulkan bahwa banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya pada saat penerbitan SPOS dan Surat Keteranganannya NPP tercetak lagi.

Tabel 1. 3
Jumlah Piutang Pajak

Tahun	Jumlah Piutang	Kenaikan
2014	1.319.769.600	
2016	3.756.439.050	185%
2019	3.830.316.619	2%

Sumber: Data Arsip UPT.PPD BAPENDA Kabupaten Magetan



Sumber : Data Arsip UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan

Gambar 1. 3
Diagram Perkembangan Piutang Pajak

Pada Tabel 1.3 dan Gambar 1.3 adalah Data dimana data tersebut merupakan data dinamis yang didapatkan pada tahun 2014- 2019 UPT.PPD BAPENDA Magetan memiliki jumlah piutang yang terus menerus bertambah, dan pada tahun 2019 UPT.PPD BAPENDA Kabupaten Magetan memiliki piutang sebesar 3.830.316.619 sehingga dapat dikatakan bahwa ada beberapa mekanisme yang kurang efektif diterapkan pada UPT.PPD BAPENDA Magetan sehingga piutang yang tidak tertagih tersebut mengalami kenaikan. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan pihak internal yaitu petugas pemungut pajak serta pihak eksternal yaitu Wajib Pajak. Dua masalah utama yang terjadi adalah masalah yang berkenaan dengan prosedur dan mekanisme pembayaran pajak.

Faktor yang pertama adalah dari pihak internal perusahaan yaitu petugas pemungut pajak yang dalam tugasnya tidak mampu menjangkau semua lingkungan yang ada disekitar Kabupaten Magetan sehingga ada beberapa wilayah yang tidak langsung dilakukan penagihan dengan sistem *door to door* melainkan hanya melalui pelayanan SAMSAT keliling yang ada saat sore hari.

UPT.PPD BAPENDA Magetan juga kurang mengadakan sosialisasi untuk penyampaian bagaimana mekanisme dari pembayaran pajak. Dapat dilihat bahwa ketika sedang melakukan dinas luar dengan sistem *door to door* , Wajib Pajak sering tidak mengetahui berapa batas waktu pembayaran pajak mulai penerbitan SPOS, sehingga sampai terbit pada penerbitan NPP atau bahkan sampai penerbitan NTP Wajib Pajak belum melakukan pembayaran PKB. Faktor selanjutnya adalah dari tingkat ekonomi Wajib Pajak sendiri yang mengakibatkan

kurangnya kesadaran serta kepatuhan masyarakat disekitar Kabupaten Magetan.

Faktor lain yaitu dikarenakan ketidaksesuaian sistem yang diterapkan oleh pihak UPT. PPD BAPENDA Kabupaten Magetan yang berpedoman pada Peraturan Gubernur. UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan tidak mengorganisir jumlah surat keluar dan jumlah surat kembali. Hal ini menyebabkan surat yang seharusnya kembali tidak sesuai dengan jumlah surat yang dicetak sehingga terkadang ada Wajib Pajak yang tidak mendapat perhatian atau luput dari penagihan apabila surat yang dibawa hilang atau terselip oleh petugas ketika sedang melakukan dinas luar. UPT.PPD BAPENDA Kabupaten Magetan juga menggunakan sistem *Electronic* yaitu dengan menggunakan *E-Samsat* yang diketahui bahwa kebanyakan Wajib Pajak di Kabupaten Magetan kurang mengerti mengenai teknologi atau bahkan tidak memiliki alat komunikasi yang bisa tersambung dengan internet.

Pemerintah Daerah menggunakan pajak sebagai sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Salah satunya adalah pemungutan PKB yang dilaksanakan oleh UPT PPD BAPENDA Magetan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Apabila sistem pemungutan pembayaran PKB memiliki masalah dalam pelaksanaannya dan tidak berjalan dengan efektif, maka sudah jelas bahwa penerapan sistem tersebut akan menimbulkan masalah yang berdampak pada keberhasilan UPT PPD BAPENDA Jawa Timur Magetan untuk merealisasikan PAD Kabupaten Magetan khususnya dalam sektor kendaraan bermotor dan juga akan meningkatkan jumlah piutang yang ada.

Berdasarkan uraian diatas maka sistem yang diterapkan menjadi penting karena digunakan sebagai upaya UPT PPD BAPENDA Magetan dalam merealisasikan target PAD. Oleh karena itu, tugas akhir ini mengambil judul “EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN TERHADAP PIUTANG dan REALISASI PAD PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UPT. PPD BAPENDA MAGETAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Ada beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas. Berikut penulis memberikan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah sistem pemungutan dan penagihan yang dilakukan oleh petugas pajak dari UPT.PPD Kabupaten Magetan?
2. Apakah yang menjadi penyebab dalam timbulnya piutang PKB pada UPT. PPD BAPENDA Kabupaten Magetan?
3. Apa hubungan antara sistem pemungutan dan piutang PKB terhadap PAD yang diperoleh di UPT. PPD BAPENDA Kabupaten Magetan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, maka dapat dirumuskan tujuan pentingnya dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :`

1. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem pemungutan dan penagihan yang dilaksanakan oleh petugas pajak UPT.PPD BAPENDA Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penyebab timbulnya

piutang tidak tertagih pada UPT.PPD BAPENDA Kabupaten Magetan.

3. Untuk mengetahui apa keterkaitan antara sistem pemungutan, piutang PKB terhadap PAD yang diperoleh UPT. PPD BAPENDA Kabupaten Magetan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan dan tujuan diatas, penulis mengharapkan penelitian tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Berikut manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi UPT. DIPENDA Kabupaten Magetan

Dapat menjadi saran serta bahan masukan atas kinerja perusahaan atau instansi dalam usaha menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan PKB.

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Tugas Akhir ini merupakan bentuk implikasi atas upaya yang dilakukan antara STIE Perbanas Surabaya dengan UPT. BAPENDA Kabupaten Magetan sehingga dapat dijadikan wadah bagi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang didapatkan selama di perkuliahan.

3. Bagi Pembaca Lainnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan sekaligus menjadi referensi untuk penelitian khususnya pada bidang perpajakan kemudian hari.